

MOU RI - GAM

GAM BUKAN ACEH ACEH BUKAN GAM

Ada upaya keras dari Pemerintah RI untuk mensosialisasikan nota kesepahaman (MOU) antara Pemerintah RI - Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Tampak sekali upaya Pemerintah membentuk opini publik, bahwa menentang MOU lama artinya dengan tidak senang terwujudnya damai di Aceh.

Semua orang suka damai apalagi masyarakat aceh yang sudah terlalu lama menderita.

Persoalannya damai yang bagaimana yang ingin kita capai ? Damai yang kita inginkan adalah damai yang adil, damai yang bermartabat dan damai dalam bingkai NKRI. Bangsa Indonesia cinta damai akan tetapi lebih cinta kemerdekaan. Apakah butir - butir dalam MOU itu dapat mewujudkan damai seperti tersebut diatas dan apakah menghasilkan damai yang benar - benar diharapkan masyarakat Aceh itu sendiri.

GAM tidak identik dengan rakyat Aceh, rakyat Aceh bukan GAM. GAM adalah separatis yang bertujuan melepaskan diri dari NKRI. Butir - butir MOU cenderung menghasilkan damai sesuai aspirasi GAM yang ingin keluar dari NKRI. Kita yakin hal ini bukan aspirasi masyarakat Aceh. -Rakyat Aceh menghendaki damai dalam arti kehidupan yang tenang, tentram, bebas dari rasa takut dan perlakuan yang adil dan bermartabat. Kita sangat memahami masyarakat Aceh tidak ingin kekerasan seperti yang dilakukan GAM dan tidak ingin keluar dari NKRI.

Butir - butir MOU memberi peluang tercapainya cita - cita perjuangan GAM dimana Aceh akan merupakan negara dalam negara; Aceh akan menjadi federasi ; Aceh bisa keluar dari NKRI. Contoh kecil : Pemerintah dan DPRD Aceh yang ada sekarang (hasil Pemilu 2004) tidak lagi berhak melahirkan segala kebijakan dan keputusan apapun sampai terbentuknya Pemerintah dan DPRD Aceh yang baru, bahkan segala kebijakan dan keputusan Pemerintah

Pusat dan DPR RI tentang Aceh harus lebih dulu mendapat persetujuan dari kepala Pemerintah dan DPRD Aceh yang baru. Bukankah ini bermakna negara dalam negara.

MULTITAFSIR

MOU antara Pemerintah RI - GAM yang ditandatangani 15 Agustus lalu, penuh dengan multitafsir. Pemerintah punya penafsiran sendiri sementara GAM juga punya penafsiran lain. Pemerintah bisa saja menafsirkan bahwa MOU akan membuat Aceh tetap menjadi bagian dari NKRI, sementara GAM menafsirkan bahwa Aceh "merdeka" bukan bagian dari NKRI. Begitu pula GAM menafsirkan bahwa "Gerakan Aceh Merdeka" tidak bubar dengan adanya MOU ini.

Perhatian Pemerintah yang berlebihan terhadap Aceh yang tertuang dalam MOU akan menumbuhkan rasa iri hati dari daerah - daerah lain. Lebih jauh lagi hal ini akan menjadi preseden gerakan serupa untuk tujuan sama seperti yang dilakukan GAM. Lihat Papua, yang mulai diotak - atik oleh anggota senat Amerika Serikat, demikian juga terhadap daerah - daerah lain tidak mustahil akan terjadi.

MOU RI - GAM adalah sebuah pintu masuk bagi kekuatan asing untuk mengobok - obok Indonesia. Kita khawatir kehadiran tim monitoring asing di tanah rencong akan memperkuat posisi GAM dan akan memperlancar keluarnya Aceh dari NKRI. Kita harus waspada bahwa pihak asing lebih senang melihat Indonesia terpecah (Indonesia mini) daripada NKRI utuh (Indonesia Raya). Lupakan kita "glasnots dan perestroika yang memporak porandakan negara super power Uni soviet serta balkanisasi yang menceraikan Yugoslavia?

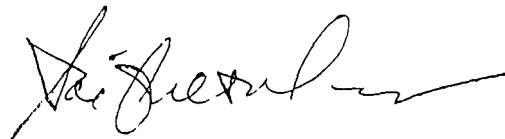
AMM dan CMI bukan sekedar memonitor pelaksanaan MOU akan tetapi juga mempunyai kewenangan memutuskan. Keputusan AMM dan CMI ini mengikat kedua belah pihak, baik GAM maupun RI. Terlihat jelas betapa tidak berdaulatnya Pemerintah RI.

PARTAI LOKAL

Mengenai pembentukan partai lokal di Aceh 1 (satu) sampai 1,5 (Satu Setengah) tahun mendatang. Hendaknya segenap lapisan masyarakat terutama kepada elit negeri dan politisi muda untuk tidak sekedar melihat dari segi juridis formal dan kehidupan yang demokratis saja tapi perlu juga ditinjau dari aspek politis.

Kehadiran partai lokal suatu yang wajar dan sah - sah saja dan merupakan alternatif dihadapkan kepada partai nasional yang tidak berakar di daerah. Khusus untuk Aceh dimana GAM bercita - cita untuk melepaskan diri dari NKRI, kehadiran partai lokal dapat digunakan GAM untuk membangun opini rakyat dalam mencapai cita - cita perjuangannya.

Mungkin kehadiran partai lokal akan lebih menumbuhkan kehidupan yang demokratis tapi untuk Aceh kita - harus lebih sabar. Apa artinya demokratis kalau hal ini akan berujung pecahnya republik ini.



SAIFUL SULUN